

Demokrasi dalam Bingkal Digital

Oleh: Siska Sasmita

ABSTRACT

This article will discuss about democracy in digital framework. Transition in information technology and communications contribute to the existence of democracy in many countries. In developed countries, the virtual space becomes a new means of representing identity and participate in the political sphere. In addition to bridging the distance, the virtual space accommodate more voice and interests.

Kata Kunci: *Demokrasi, bingkal digital, teknologi informasi, political sphere*

I. PENDAHULUAN

Konsolidasi kekuatan negara pada abad ke-18 dan ke-19 membantu perkembangan identitas rakyat sebagai subjek politik –sebagai warga negara. Itu berarti bahwa orang-orang yang tunduk kepada otoritas sebuah negara secara perlahan menjadi sadar akan keanggotaan mereka dalam suatu masyarakat dan sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bisa diberikan oleh keanggotaan semacam itu¹.

Semenjak diperkenalkannya mesin cetak di Eropa pada per-tengahan abad ke-15, teknologi komunikasi yang menggunakan mesin telah memengaruhi pembentukan identitas politik². Perkembangan teknologi komunikasi yang kemudian diikuti dengan kemajuan dalam teknologi informasi memberikan warna baru

bagi kehidupan politik di berbagai negara. Teknologi informasi dan komunikasi menyediakan akses lebih luas terhadap informasi dan kemampuan warga negara dalam merefleksikan aspirasinya di luar lingkup individu.

Masyarakat informasi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi mulai bergerak membentuk ruang-ruang publik virtual sebagai sarana merepresentasikan kehendak dan menyatakan eksistensi mereka. Keberadaan teknologi-teknologi baru tersebut mengundang kita berpikir ulang mengenai demokrasi di era digital, yang akan dibahas dalam paparan berikut.

II. PROSPEK DEMOKRASI DIGITAL

Masyarakat di Amerika menjadi digital dengan lincah. Dunia analog memudar dan digantikan oleh dunia digital yang di didalamnya terdapat fungsi telepon, jaringan-jaringan komputer, dan televisi-televisi yang jumlahnya kian hari bertambah. Tentu

¹Held, David. 2004. *Demokrasi dan Tataan Global Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

² Anderson dalam Held, David. 2004. *Ibid*

saja peralatan-peralatan tersebut akan terus digunakan terutama untuk tujuan non-politik. Jajak pendapat di Amerika yang hasilnya dipublikasikan pada bulan Juni 1999 memperlihatkan bahwa publik memandang keberadaan televisi masih sebagai sarana hiburan³. Namun kemudian memang datang tuntutan perubahan dari masyarakat agar televisi lebih merepresentasikan kepentingan publik. Dengan televisi dan radio sebagai media yang tersebar luas, dan dengan peran mereka yang menonjol dalam menginformasikan publik dalam keadaan yang baik maupun buruk, maka dampak potensialnya pada perbaikan perilaku dalam kehidupan politik tidak dapat diremehkan⁴.

Sesungguhnya keberadaan teknologi informasi dan komunikasi tidak semata berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai walaupun tak dapat disangkal bahwa infrastruktur tersebutlah yang menjadi salah satu prasyarat keberhasilan. Hal yang paling penting sebenarnya berkaitan dengan kemampuan teknologi untuk menjembatani jarak dan memperluas akses sehingga informasi tersedia dan dapat dimanfaatkan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Menurut Leggewie dan Bieber, kebebasan memperoleh atau memberikan informasi secara efektif lebih penting daripada potensi mendapatkan akses dalam proses politik digital⁵.

³ Hasil penelitian Benton Foundation 1999 sebagaimana dikutip Wilhelm. 2003. *Demokrasi di Era Digital Tantangan Kehidupan Politik di Ruang Cyber*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴ Wilhelm, Anthony G. 2003. *Ibid*.

⁵ Leggewie, Claus dan Christoph Bieber. *Demokrasi Interaktif. Komunikasi Politik melalui Online dan Proses- Proses Politik Digital*. <http://forum-politisi.org>

Dari pendapat tersebut tersirat bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya merupakan perantara lintas batas dalam menyajikan dan mengakses informasi bagi publik. Poin pentingnya terletak pada kemampuan publik untuk memanfaatkan informasi yang tersedia bagi pembentukan opini mereka terhadap masalah-masalah publik yang kemudian akan memengaruhi pembentukan kebijakan publik.

Keberadaan media dan teknologi dinilai sebagai pembaharuan atas “demokrasi langsung ala Athena.” Demokrasi Athena memerlukan suatu komitmen umum terhadap prinsip kebijakan kewarganegaraan: pengabdian kepada negara kota republik dan ketundukan kehidupan pribadi terhadap masalah-masalah publik dan kebaikan bersama. Ranah publik dan privat terjalin berkelindan. Rakyat (*demos*) terlibat dalam fungsi-fungsi legislatif dan pengadilan, sebab konsep kewarganegaraan Athena menuntut keikutsertaan mereka dalam fungsi-fungsi ini, dengan berpartisipasi langsung dalam masalah-masalah negara⁶.

Jika dikaitkan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi maka perwujudan konsep kewarganegaraan sebagaimana yang dipersyaratkan demokrasi langsung ala Athena tampaknya akan tercipta dengan lebih baik. Melalui media teknologi yang tersedia warga negara akan dengan sangat mudah terlibat dan melibatkan diri dalam segala aspek yang menyangkut perikehidupan bersama.

⁶ Sama dengan catatan kaki no.1 hal 1

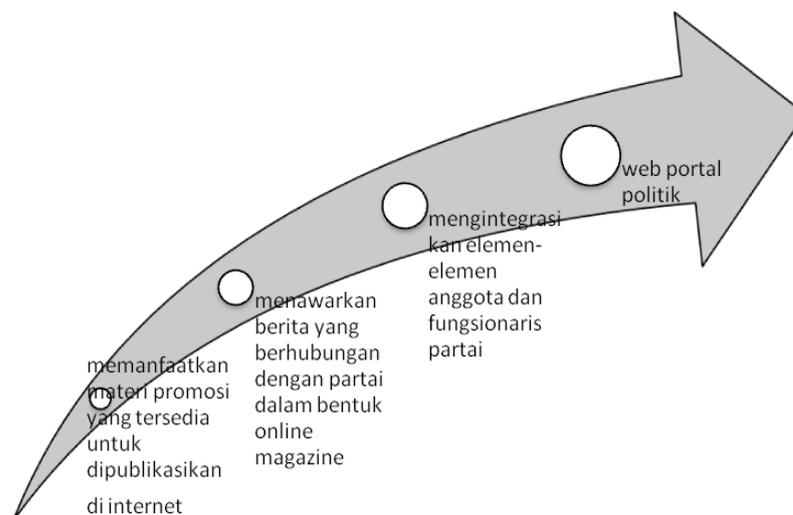
III. DEMOKRASI ELEKTRONIK

Konsep pendesainan ruang publik virtual demokrasi menyajikan bentuk nyata dari demokrasi elektronik sebagai penopang komunikasi politik. Berikut ini beberapa apikasinya dalam ranah partai politik menurut Leggewie dan Bieber:

1. Pusat partai virtual

Istilah komunikasi partai melalui teknik digital mungkin sudah tidak

asing lagi. Istilah ini menggambarkan penggunaan berbagai teknologi komunikasi *online* yang berbasis internet di dalam atau melalui organisasi partai. Di Jerman –seperti yang kemudian diikuti Indonesia – bermunculan *website-website* politik sebagai cerminan perkembangan demokrasi digital. Berikut ini jenjang yang biasanya dilalui partai dalam tahapan komunikasi politik digitalnya:



Sumber: diolah dari Leggewie dan Bieber

2. Forum, chats dan peristiwa-peristiwa melalui online

Model aktivitas komunikasi yang khas tawaran (program) *online* untuk para pengguna telah mendorong terbentuknya kelompok pengguna situs politik yang seringkali untuk jangka waktu lama mengadakan pembahasan politik dalam konstelasi personal yang berganti-ganti. Terbentuknya komunitas ini biasanya sejalan dengan tema-tema yang didiskusikan dalam *website*.

3. Organisasi partai digital

Di bidang organisasi, partai internet di beberapa negara juga mulai berkembang sebagai lahan aksi yang kreatif. Ciri paling penting dari dari struktur ini adalah bentuk virtualnya yang melampaui konstruksi regional dan biasanya tidak lagi menuntut adanya proses formal menjadi anggota organisasi.

4. Kampanye online

Internet telah menjadi arena komunikasi politik akhir-akhir ini. Jaringan komputer internal partai

merupakan unsur strategis yang penting bagi terciptanya kampanye yang profesional.

5. *Online-protest*

Sebagai imbas dari kampanye via *online* yang dilakukan ‘dari atas’ (oleh kandidat/ politisi), sejak pertengahan tahun 90-an di Jerman – sebagai pelopor – juga telah muncul ‘kampanye dari bawah’ yang menjadikan in-ternet sebagai media yang menarik bagi komunikasi politik. Umumnya kampanye politik ini dalam bentuk aksi protes. Yang menjadi sasaran protes melalui internet adalah pelaku politik atau politisi secara kolektif.

Dalam bentuk sederhana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi peningkatan peran serta warga negara dalam kehidupan demokrasi dapat dilihat dalam kasus Amerika. Tingkat melek teknologi (*e-literacy*) yang tinggi dari masyarakatnya mendorong mereka untuk menggunakan fasilitas-fasilitas elektronik dalam menyampaikan pandangan dan memberikan dukungan bagi wakilnya melalui internet, telepon seluler, dan lainnya yang sejenis⁷. Penyebaran informasi publik dinilai lebih bermanfaat dengan cara ini, begitupun pengumpulan opini masyarakat terhadap kebijakan publik tertentu.

Model-model demokrasi elektronik yang sedang dan akan berkembang pada dasarnya penulis lihat sebagai bentuk kepedulian warga

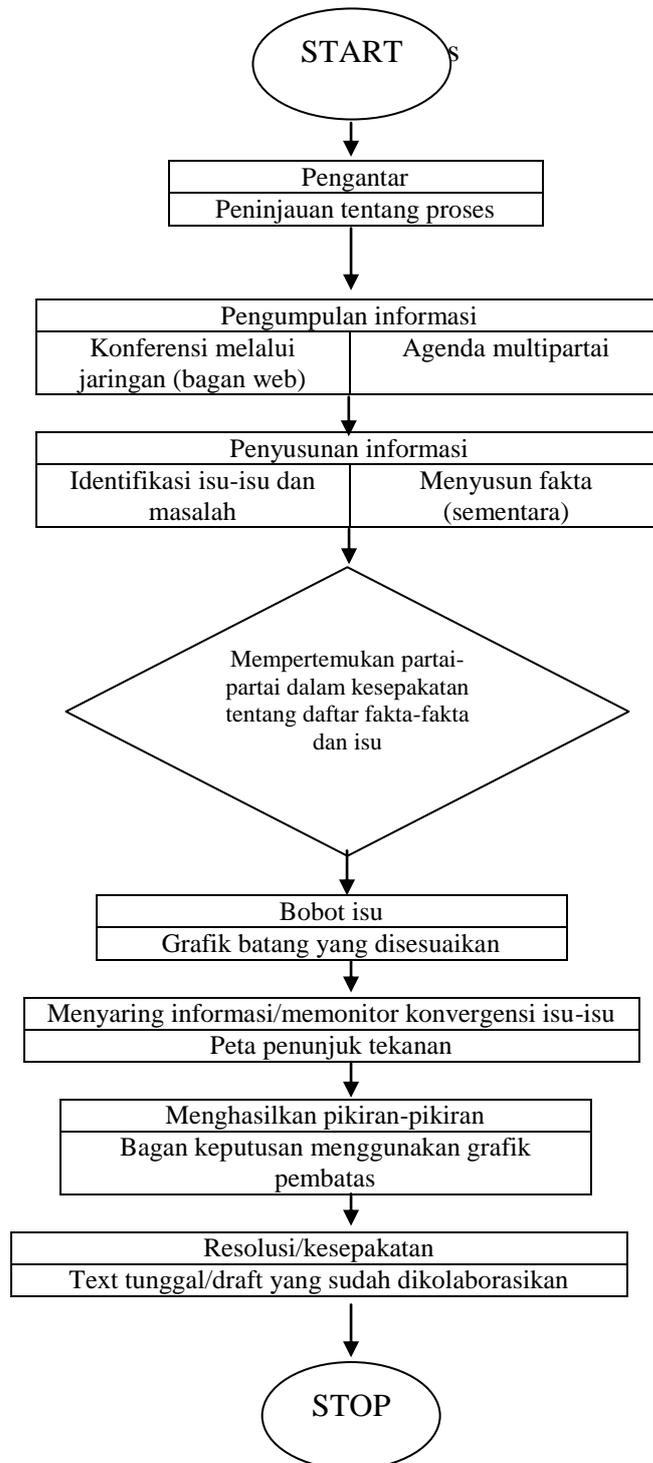
negara terhadap proses demokrasi. Ruang virtual yang tersedia merupakan sarana untuk menyatakan visi, ukuran ataupun persoalan demokrasi menurut versi masing-masing individu. Dialoglah yang kemudian menjadi jembatan integrasi untuk menumuhkan budaya demokrasi.

Terobosan demokrasi yang disalurkan melalui sarana digital/virtual sepertinya merupakan bentuk baru peningkatan kapasitas warga negara untuk mengembangkan dan meningkatkan gerakan sosial. Jika pada abad ke-17 dan ke-18 akar gerakan sosial Eropa dan Amerika hadir dalam bentuk revolusi rakyat terhadap pemerintahan raja yang otoriter sehingga sejumlah elit dan rakyat mempertanyakan klaim negara terhadap demokrasi maka seiring dengan perkembangan budaya literasi dan teknologi maka gerakan sosial untuk tujuan demokrasi dapat diakomodasi dalam konteks dan kapasitas lebih besar.

Menurut Wilhelm (2003:244) beberapa perubahan bisa dilaksanakan dengan adil dan mudah yang secara potensial bisa mengurangi beberapa hambatan. Hubungan politik virtual diasumsikan bisa menguntungkan dari seni penyelesaian konflik. Gambar berikut akan memperlihatkan bagaimana proses ini mungkin terjadi:

⁷ Sebagaimana ditulis Halsted dalam www.voaindonesia.com

Diagram Pertimbangan Pemecahan Permasalahan secara Online



Sumber: Wilhelm, 2003:246

Diagram di atas menggambarkan bagaimana proses pemecahan masalah mungkin terjadi, melalui presentasi informasi yang ditawarkan, berbagai pihak kemudian dapat menyetujui pendekatan yang menyeluruh atas sebuah isu yang terdaftar, dan juga menimbang serta menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan bantuan fasilitator. Dengan memfasilitasi debat dan diskusi, isu tersebut dikristalisasi dan diorganisir sehingga keputusan dan penyelesaian bisa dicapai melalui tahapan tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil bukan satu-satunya hasil dari skema pemecahan konflik di atas. Para peserta idealnya menghormati dan memahami sudut pandang orang lain, dan bahkan mengubah pendapat mereka melalui argumentasi persuasif serta presentasi informasi yang sebelumnya mungkin tidak disadari oleh lawan bicara.

Fasilitasi atau sikap yang moderat dari forum politik *online* sangat penting untuk membantu kesuksesan para pembuatan kebijakan. Dalam menjembatani, fasilitator yang memiliki kemampuan dan dipercaya sering diperlukan untuk mengendalikan forum dan membantu menciptakan ketertiban dari kecacauan potensial. Melalui penggunaan sumber daya perangkat lunak yang tersedia luas, seorang fasilitator mungkin mampu menstrukturkan suatu forum politik, misalnya saja dengan mengumpulkan sebanyak mungkin opsi atau pendapat masyarakat terhadap suatu isu sebelum dibawa dalam forum resmi yang mengakomodasi isu atau persoalan tertentu yang berkembang di masyarakat.

Bentuk yang tersedia dari diagram di atas sesungguhnya memungkinkan kebebasan setiap individu untuk mengespresikan aspirasinya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik, yang berarti memfasilitasi mereka untuk berdiskusi dengan politisi. Intinya adalah demokrasi komunikatif yang dibingkai oleh kemudahan teknologi.

IV. PENUTUP

Upaya awal yang dilakukan untuk memperlihatkan komitmen dalam pemerintahan yang terbuka terhadap proses demokrasi diawali dengan pengenalan website oleh Gedung Putih pada musim gugur 1994, yang memungkinkan publik berpartisipasi dalam tur virtual di gedung Putih, disertai dengan gambar dan suara dari Presiden dan wakil Presiden Amerika Serikat.

Berbicara tentang konsep demokrasi tak akan terlepas dari demokrasi Athena yang telah lama diambil para ahli sebagai sumber inspirasi fundamental bagi pemikiran politik modern. Walaupun banyak nilai-nilai demokrasi yang juga bersumber dari peradaban tua di Timur namun cita-cita politik Athena – persamaan diantara warga negara, kebebasan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan – lah yang kemudian dijadikan titik tolak bagi keberhasilan demokrasi modern.

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi kemudian menjadi pemicu berkembangnya nilai-nilai demokrasi seperti yang diidealkan para pakar di atas. Kemudahan akses informasi dan kemampuan menjembatani

jarak menjadikan gagasan seperti pertimbangan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan menjadi mudah direalisasikan.

Berbagai model demokrasi komunikatif yang didukung sarana virtual atau digital bermunculan dewasa ini, mulai dari web partai, kampanye *online*, hingga *m-voting*. Apapun bentuknya, demokrasi digital tersebut bermaksud menyediakan akses informasi dengan beragam rupa, menyediakan ruang publik yang menjadi prasyarat bagi sebuah tatanan demokrasi, dan interaksi memadai antara warga negara dengan pemerintah, maupun antarsesama warga negara.

Walaupun kehadiran demokrasi digital seolah bisa mendeterminasi kelemahan cara demokrasi manual, bukan berarti model ini tanpa kekurangan sama sekali. Patut dipertimbangkan aplikasinya dalam masyarakat kelak. Apakah informasi yang tersedia di ruang maya benar-benar berkualitas dan dapat diakses tanpa kendala oleh setiap individu

dimana dan kapan saja? Atau apakah ruang publik virtual yang dihadirkan oleh media digital justru akan menjadi potensi konflik baru?

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam penerapan demokrasi digital adalah aktor-aktor sosial dan budaya politik setempat. Penerapan teknologi informasi di satu sisi memungkinkan terjadinya perluasan partisipasi lewat komunikasi politik yang terjalin. Tetapi di sisi lain kesuksesan penerapannya juga bergantung pada kapasitas pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan kemampuan negara untuk mengontrol keberadaan saluran demokrasi digital.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan bentuk dinamis yang merespon budaya demokrasi di suatu negara. Oleh karena itu komitmen yang sungguh-sungguh dari setiap elemen diperlukan untuk mendukung keberadaan demokrasi digital demi mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang lebih demokratis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim. ---. "*Demokrasi akan Kita Miliki Jika Kita Menggenggamnya.*" <http://kedai.kebebasan.org>.
- Bagun, Rikard dan Servas Pandun (Ed). 1997. *Demokrasi dalam Tajuk*. Jakarta:Institut Ecata bekerjasama dengan INPI Pact
- Diamod, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation (terj)*. Yogyakarta:IRE Press.
- Halsted, Gil. 2003. "*Peran Internet dalam Demokrasi*". www.voaindonesia.com
- Held, David. 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

- Leggewie, Claus dan Christoph Bieber. “*Demokrasi Interaktif Komunikasi Politik melalui Online dan Proses-Proses Politik Digital.*” <http://forum-politisi.org>
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Tsagarousianou, Roza. 2000. “*Electronic Democracy in Practice: One, Two, Three...Countless Variants.*” <http://document.irevues.inist.fr>
- Wilhelm, Anthony G. 2003. *Demokrasi di Era Digital Tantangan Kehidupan Politik di Ruang Cyber.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.